

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perundungan di lingkungan sekolah hingga kini masih menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan karena tidak hanya mengancam keamanan dan kenyamanan peserta didik, tetapi juga mencerminkan belum terbentuknya budaya toleransi yang kuat di lingkungan sekolah. Perundungan yang umum ditemukan di lingkungan sekolah meliputi pemerasan, perundungan verbal (ejekan), eksklusi sosial (pengucilan), intimidasi psikologis, serta berbagai bentuk kekerasan fisik. (Humas KPAI, 2024), menunjukkan bahwa nilai-nilai saling menghargai, menghormati perbedaan, empati, dan kepedulian antarsesama belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan warga sekolah. Meskipun berbagai kebijakan dan program pencegahan telah diterapkan, praktik perundungan masih terus terjadi karena sebagian besar upaya yang dilakukan lebih berorientasi pada penanganan kasus setelah peristiwa terjadi daripada membangun sistem nilai yang mampu mencegah munculnya perilaku tersebut sejak awal.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada perilaku perundungan itu sendiri, tetapi juga pada belum terbentuknya budaya toleransi sebagai fondasi kehidupan sekolah yang aman, inklusif, dan berkarakter. Karakter penting yang perlu dikembangkan di lingkungan sekolah adalah sikap toleransi, karena mampu membangun hubungan sosial yang harmonis serta mencegah terjadinya perilaku negatif, termasuk bullying (Moh. Nur Akbar Hafizul Ilmi, Hairul Huda, 2026). Diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus perundungan, tetapi juga pada proses membangun budaya toleransi melalui gerakan anti-perundungan

yang melibatkan seluruh warga sekolah secara berkelanjutan, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang mampu menanamkan nilai saling menghormati dan mencegah terulangnya praktik perundungan.

Perundungan (*bullying*) di sekolah telah menjadi isu global yang mengancam hak anak atas pendidikan yang aman, inklusif, dan berkualitas, sekaligus menjadi tantangan dalam mencapai target *Sustainable Development Goal 4*. Berdasarkan laporan (UNESCO 2019), hampir sepertiga peserta didik di dunia (32%) di 144 negara pernah mengalami berbagai bentuk perundungan, mulai dari fisik, verbal, psikologis, seksual, hingga *cyberbullying*. Masalah ini sering kali dipicu oleh rendahnya toleransi terhadap keberagaman, di mana peserta didik yang dipandang berbeda secara fisik, ras, agama, maupun status sosial ekonomi menjadi lebih rentan menjadi korban. Perundungan ini sangat multidimensional karena tidak hanya menurunkan prestasi akademik, tetapi juga memicu gangguan kesehatan mental yang serius seperti kecemasan, depresi, dan PTSD. Sebagai solusi, berbagai negara kini menggeser paradigma penanganan dari tindakan represif ke pendekatan preventif berbasis budaya sekolah (*whole-school approach*) (Media DPR RI, 2024). Strategi ini dilakukan dengan cara membangun iklim sekolah yang positif, meningkatkan kapasitas guru, menyediakan sistem pelaporan yang efektif, serta menginternalisasikan nilai empati dan toleransi secara berkelanjutan.

Fenomena perundungan di Indonesia masih menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan berkarakter, meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan pencegahan. Berdasarkan data Asesmen Nasional, sekitar 24,4% peserta didik berpotensi mengalami perundungan, khususnya di tingkat sekolah menengah. Kondisi ini diperkuat oleh laporan KPAI tahun

2023 yang menerima 329 pengaduan di klaster pendidikan, di mana kasus perundungan mendominasi dan 20 di antaranya berakibat fatal hingga menyebabkan kematian. KPAI menilai kasus-kasus yang muncul ini merupakan fenomena gunung es karena masih banyak insiden yang tidak dilaporkan (Humas KPAI, 2024). Perundungan dalam bentuk fisik, verbal, intimidasi psikologis, hingga *cyberbullying* ini menunjukkan bahwa penanganan selama ini masih cenderung bersifat kuratif (menyelesaikan setelah kejadian). Keberadaan aturan dan tim pencegahan di sekolah terbukti belum optimal menciptakan ruang belajar yang aman karena belum diikuti oleh internalisasi nilai toleransi, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kehidupan sehari-hari warga sekolah.

Salah satu karakteristik paling menonjol di Jawa Timur adalah kerentanan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren dan sekolah berasrama. Kondisi ini diperparah oleh siklus psikologis yang sistematis, di mana penelitian di wilayah Jombang dan Pasuruan mengungkapkan bahwa korban perundungan di masa lalu cenderung bertransformasi menjadi pelaku baru ketika mereka naik tingkat menjadi senior. Interaksi 24 jam penuh tanpa pengawasan intensif menciptakan ruang di mana perundungan fisik dan psikologis dapat terjadi secara berulang akibat ketimpangan relasi kuasa tersebut.

Perundungan di kawasan Surabaya bermanifestasi dalam bentuk yang berbeda, yakni dominasi kekerasan verbal, intimidasi sosial, hingga ranah siber. Penelitian di lingkungan Jawa Timur mengidentifikasi bahwa tingginya egosentrisme dan agresivitas anak usia sekolah menjadi pemicu utama terjadinya gesekan antarsiswa (Fajriah et al., 2024). Bentuk perundungan ini sering kali dikamufleskan atau tersembunyi dalam interaksi digital, sehingga menyulitkan deteksi dini oleh pihak sekolah (Rifda Haura Fathina Besri, 2026). Hal ini menuntut peran yang jauh lebih aktif dari guru Bimbingan

Konseling (BK) untuk melakukan intervensi, sebagaimana yang disoroti dalam studi kasus penanganan perundungan di sekolah menengah.

Berbagai penelitian menjelaskan bahwa *name-calling* atau pemberian julukan yang bersifat merendahkan merupakan salah satu bentuk verbal bullying yang dapat berdampak pada menurunnya harga diri, kesejahteraan psikologis, serta kualitas hubungan sosial peserta didik. Fenomena tersebut tidak dapat dipandang sebagai sekadar candaan antarteman, melainkan perlu dipahami sebagai bagian dari persoalan budaya sekolah yang berkaitan dengan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan penting untuk mengkaji bagaimana gerakan anti-perundungan dikembangkan sebagai upaya membangun budaya toleransi di lingkungan sekolah.

Fenomena ini menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji dalam upaya penguatan nilai toleransi dan penghormatan terhadap martabat setiap individu (Dan Olweus, 1993). Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai saling menghargai, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan warga sekolah. Oleh karena itu, diperlukan gerakan anti-perundungan yang tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada pembentukan budaya toleransi sebagai bagian dari budaya sekolah.

Fenomena saling mengolok-olok menggunakan nama julukan dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif teoretis. Menurut Dan Olweus (1993), pemberian julukan yang bertujuan mengejek, merendahkan, atau mempermalukan seseorang secara berulang termasuk dalam bentuk *verbal bullying* yang dapat menimbulkan dampak psikologis, seperti menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, hingga terganggunya hubungan sosial

peserta didik. Perilaku tersebut sering kali dianggap sebagai candaan oleh pelaku, padahal bagi korban dapat menimbulkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Dari perspektif Albert Bandura (1977), perilaku saling mengejek dipelajari melalui proses observasi dan peniruan terhadap lingkungan sosial.

Ketika peserta didik melihat teman sebayanya melakukan ejekan tanpa memperoleh teguran atau sanksi, perilaku tersebut cenderung dianggap wajar dan terus diulang hingga menjadi kebiasaan. Selanjutnya, Edgar H. Schein (2010) menjelaskan bahwa kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh anggota organisasi akan berkembang menjadi bagian dari budaya. Masalah yang dialami oleh para siswa ini adalah Perilaku saling mengejek menunjukkan pentingnya penguatan sikap sosial peserta didik melalui pembiasaan empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan interaksi yang positif. Oleh karena itu, pembentukan budaya toleransi perlu terus diperkuat melalui keterlibatan seluruh warga sekolah (Sentia & Hastuti, 2025). Pembangunan budaya toleransi melalui gerakan anti-perundungan dapat menjadi strategi preventif untuk menginternalisasikan nilai saling menghargai, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari praktik perundungan, sebagaimana direkomendasikan oleh UNESCO dalam upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perundungan di lingkungan sekolah masih menjadi persoalan yang kompleks, khususnya dalam bentuk perundungan verbal yang sering kali dinormalisasi sebagai candaan antarteman. Penelitian Dan Olweus menjadi landasan bahwa perilaku mengejek, menghina, atau memberikan nama julukan yang merendahkan termasuk kategori *verbal bullying* apabila dilakukan secara sengaja,

berulang, dan menimbulkan ketidaknyamanan pada korban. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian internasional terbaru yang menegaskan bahwa bentuk perundungan verbal, seperti ejekan dan *name-calling*, merupakan bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di sekolah serta berkontribusi terhadap terbentuknya iklim sekolah yang tidak aman apabila tidak ditangani melalui pendekatan budaya sekolah (*whole-school approach*) (Dan Olweus, 1993). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis budaya lokal mampu meningkatkan sikap anti-perundungan dan perilaku saling menghormati peserta didik, sehingga penguatan nilai budaya menjadi salah satu strategi preventif yang efektif dalam mencegah perundungan. Selain itu, perkembangan riset mutakhir menekankan pentingnya membedakan antara candaan dan perundungan verbal karena keduanya sering kali dipersepsikan sama oleh peserta didik, padahal memiliki dampak psikologis yang berbeda terhadap korban.

Pada konteks Indonesia, penelitian mengenai perundungan juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Iklim sekolah yang positif dan pemantauan orang tua berpengaruh signifikan terhadap rendahnya perilaku perundungan peserta didik, sehingga pembangunan budaya sekolah menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan (Prasetyo & Purwoto, 2025). Penelitian lain mengenai implementasi Program Roots Indonesia menemukan bahwa keberhasilan program anti-perundungan ditentukan oleh keterlibatan aktif seluruh warga sekolah dalam membangun budaya yang aman dan suportif, bukan hanya melalui pemberian sanksi kepada pelaku (Devi et al., 2024). Selanjutnya, penelitian (Wijayanti et al., 2024) mengenai *Program Sekolah Toleransi* menunjukkan bahwa kampanye anti-perundungan yang diintegrasikan dengan pendidikan toleransi mampu meningkatkan kesadaran peserta didik untuk menghargai perbedaan

serta membangun interaksi sosial yang lebih positif. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian pengabdian masyarakat yang melaporkan bahwa sosialisasi anti-perundungan berbasis pendidikan karakter berkontribusi pada terbentuknya budaya sekolah yang lebih toleran dan menurunkan kecenderungan perilaku perundungan di lingkungan sekolah.

Penelitian terdahulu masih berfokus pada identifikasi bentuk, faktor penyebab, dampak, efektivitas program, maupun pengaruh iklim sekolah terhadap perilaku perundungan. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui studi kasus ini dengan memfokuskan perhatian pada proses pembangunan budaya toleransi melalui gerakan anti-perundungan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana budaya sekolah dibentuk dan dipertahankan sebagai strategi pencegahan perundungan yang berkelanjutan.

Penelitian mengenai toleransi di sekolah lebih banyak memfokuskan pada pengembangan sikap toleransi melalui proses pembelajaran, pendidikan karakter, atau penguatan nilai-nilai multikultural. Kajian tersebut belum banyak mengaitkan toleransi sebagai budaya yang dibangun melalui praktik sosial sehari-hari warga sekolah dalam mencegah dan mengatasi perundungan. Keterbatasan pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai toleransi dikonstruksi, dimaknai, dipraktikkan, dan dipertahankan secara kolektif sehingga menjadi budaya sekolah yang mampu mencegah munculnya perilaku perundungan.

Penelitian mengenai gerakan anti-perundungan umumnya menempatkan program sebagai objek evaluasi, misalnya dengan mengukur keberhasilan pelaksanaan program atau perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti intervensi. Penelitian tersebut belum banyak mengkaji gerakan anti-perundungan sebagai proses pembentukan budaya

sekolah yang melibatkan interaksi, peran, dan praktik sosial seluruh warga sekolah, seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Keberlanjutan budaya anti-perundungan sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh warga sekolah dalam menginternalisasikan nilai-nilai toleransi ke dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis proses konstruksi budaya anti-perundungan, praktik sosial warga sekolah dalam menginterpretasikan nilai-nilai toleransi, serta proses internalisasi budaya anti-perundungan sehingga menjadi budaya sekolah yang berkelanjutan di SMPN 6 Ponorogo. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan apakah gerakan anti-perundungan berjalan efektif, tetapi juga mengungkap bagaimana gerakan tersebut membentuk budaya toleransi yang hidup dan dipraktikkan secara berkelanjutan oleh seluruh warga sekolah.

Secara teoretis, penelitian ini penting karena menawarkan perspektif yang memandang gerakan anti-perundungan bukan sekadar sebagai program pencegahan, melainkan sebagai proses konstruksi budaya sekolah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai budaya sekolah, toleransi, dan pencegahan perundungan, khususnya melalui analisis terhadap konstruksi budaya, praktik sosial, dan internalisasi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan warga sekolah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan yang selama ini lebih banyak berfokus pada faktor penyebab, dampak, atau evaluasi efektivitas program anti-perundungan.

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi kepala sekolah, guru, peserta didik, serta pemangku kepentingan pendidikan dalam merancang strategi

pencegahan perundungan yang lebih berkelanjutan melalui penguatan budaya sekolah. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kebijakan, program, dan pembiasaan yang mengintegrasikan nilai toleransi ke dalam kehidupan sehari-hari warga sekolah, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, inklusif, serta mendukung perkembangan karakter peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada cara memandang gerakan anti-perundungan bukan hanya sebagai program pencegahan kekerasan di sekolah, tetapi sebagai proses pembentukan budaya toleransi yang berlangsung melalui interaksi sosial seluruh warga sekolah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada faktor penyebab, dampak, efektivitas program, atau evaluasi implementasi gerakan anti-perundungan, penelitian ini menganalisis secara mendalam bagaimana budaya anti-perundungan dikonstruksi, bagaimana warga sekolah menginterpretasikan dan mempraktikkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasikan hingga menjadi budaya sekolah yang berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini menghasilkan pemahaman kontekstual mengenai proses pembentukan budaya sekolah yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus perundungan, tetapi juga pada transformasi nilai, norma, dan praktik sosial yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan toleran. Maka dari itu penulis mengambil judul “Membangun Budaya Toleransi: Studi Kasus Gerakan Anti-Perundungan Di SMP Negeri 6 Ponorogo”.

B. Rumusan masalah

Berikut adalah rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana budaya anti-perundungan dibangun dalam kehidupan warga sekolah agar tercipta budaya toleransi?
2. Bagaimana praktik sosial warga sekolah dalam menginterpretasikan nilai-nilai toleransi sebagai bagian dari budaya anti-perundungan?
3. Bagaimana budaya anti-perundungan diinternalisasikan sehingga menjadi budaya sekolah yang berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses membangun budaya anti-perundungan dalam kehidupan warga sekolah.
2. Menganalisis praktik sosial warga sekolah dalam menginterpretasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai toleransi sebagai bagian dari budaya anti-perundungan.
3. Menganalisis upaya mempertahankan budaya anti-perundungan sehingga menjadi budaya sekolah yang berkelanjutan

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian keilmuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,

pendidikan karakter, serta sosiologi pendidikan mengenai pembentukan budaya sekolah yang berorientasi pada nilai toleransi dan pencegahan perundungan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai proses konstruksi budaya anti-perundungan melalui perspektif Teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann, Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu, dan Teori Budaya Edgar H. Schein. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji budaya sekolah, toleransi, pendidikan karakter, serta gerakan anti-perundungan dalam konteks pendidikan.

2. **Manfaat Praktis**

a. Bagi SMP Negeri 6 Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam memperkuat pembiasaan positif, meningkatkan efektivitas program pencegahan perundungan, serta membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

b. Bagi guru dan tenaga kependidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya peran guru dalam menginternalisasikan nilai toleransi melalui pembelajaran, keteladanan, dan interaksi sosial dengan peserta didik. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan strategi pembelajaran dan pembinaan karakter yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang bebas dari perundungan.

c. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai pentingnya sikap toleransi, empati, saling menghormati, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui budaya anti-perundungan yang dikembangkan di sekolah, peserta

didik diharapkan mampu membangun hubungan sosial yang positif serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif.

d. Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya sinergi antara keluarga dan sekolah dalam menanamkan nilai toleransi, mencegah perilaku perundungan, serta membangun karakter peserta didik melalui pembiasaan yang konsisten di lingkungan keluarga dan sekolah.

e. Bagi Pemerintah dan Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan maupun pemangku kebijakan dalam merumuskan program, kebijakan, serta model pembinaan budaya sekolah yang berorientasi pada penguatan toleransi dan pencegahan perundungan. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), serta program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi peneliti berikutnya yang memiliki fokus penelitian mengenai budaya sekolah, toleransi, pendidikan karakter, praktik sosial warga sekolah, maupun gerakan anti-perundungan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian lanjutan pada jenjang pendidikan atau konteks sekolah yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini menjelaskan beberapa istilah atau definisi operasional agar tidak ada kesalahan dalam penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Budaya Toleransi

Budaya toleransi diukur melalui observasi interaksi sosial antarwarga sekolah, analisis kebijakan dan program sekolah yang mendukung inklusivitas, serta wawancara mendalam mengenai persepsi dan pengalaman individu terkait penerimaan perbedaan. Indikatornya meliputi minimnya diskriminasi, adanya dialog konstruktif antarperbedaan, partisipasi aktif dalam kegiatan multikultural, dan respons positif terhadap keberagaman (Rusmiati, 2023). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa budaya toleransi di sekolah dapat ditingkatkan melalui pendekatan pendidikan inklusif yang melibatkan pelatihan guru dan kurikulum yang mendukung keberagaman (Wika Alzana et al., 2021). Selain itu, interaksi sosial yang positif antar siswa dari latar belakang berbeda terbukti memperkuat kohesi sosial di lingkungan.

2. Gerakan Anti-Perundungan

Gerakan anti-perundungan dalam penelitian ini diobservasi melalui implementasi program-program pencegahan (misalnya, sosialisasi, kampanye), mekanisme pelaporan dan penanganan kasus perundungan, serta pelatihan bagi guru dan siswa. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap aktivitas anti-perundungan, analisis dokumen program, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai efektivitas dan tantangan implementasi gerakan ini (Rahayu & Permana, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa program anti-perundungan yang efektif memerlukan kolaborasi antara sekolah,

orang tua, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang aman (Andryawan et al., 2023).

